

STUDI IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS SAK EMKM PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) GAYA BARU DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN DOMPU

Nurhayati

nurhayati18110@gmail.com

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Elin Erlina Sasanti

elinerlina@unram.ac.id

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Widia Astuti

widiaastutiakuntansi@unram.ac.id

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

ABSTRAK

SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana implementasi akuntansi berdasarkan SAK EMKM pada usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Dompus. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Simpulan dari penelitian ini yaitu pelaku UMKM sudah memenuhi standar SAK EMKM, tetapi terdapat beberapa nama yang tidak sesuai dengan ketentuan SAK EMKM seperti laporan posisi keuangan masih menggunakan neraca, laporan laba rugi masih menggunakan perhitungan hasil usaha (PHU) catatan atas laporan keuangan masih menggunakan pos-pos neraca. Hal ini disebabkan karena kurang luasnya ruang lingkup informasi yang digunakan untuk menganalisis pengimplementasian SAK EMKM pada UMKM.

Kata Kunci : SAK EMKM, Laporan Keuangan, UMKM

ABSTRACT

SAK EMKM is a stand-alone accounting standard that can be used by entities that meet the definition of an entity without significant public accountability. This research is intended to find out how the implementation of accounting based on SAK EMKM in Micro, Small and Medium Enterprises in Dompus Regency. This research uses qualitative research with a descriptive type. Data collection was carried out with interview and documentation techniques. The conclusion of this study is that MSME actors have met the SAK EMKM standards, but there are several names that are not in accordance with the provisions of the SAK EMKM just as the statement of financial position still uses the balance sheet, the income statement still uses the calculation of the results of business (PHU) the notes to the financial statements still use the post of the balance sheet. This is due to the lack of breadth of information used to analyze the implementation of SAK EMKM in MSMEs

Keywords : SAK EMKM, Financial Statements, MSMEs

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Menengah atau Usaha besar yang memenuhi yang kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang. UMKM merupakan salah satu usaha yang mampu bertahan dibandingkan dengan sektor usaha lainnya, hal ini terbukti pada pasca krisis tahun 1997. UMKM dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, berperan mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menggerakkan sektor produksi pada berbagai lapangan usaha. Setelah krisis keuangan 1998 cukup lama, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dapat di anggap sebagai benteng ekonomi dan titik akhir sebagai peran utama dalam proses pemulihan ekonomi nasional serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja (Sularsih, 2019).

Dengan demikian kegiatan tersebut dapat meningkatkan lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan total pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mencapai stabilitas nasional. Akuntansi berperan penting dalam kemajuan UMKM, karena dengan pencatatan akuntansi yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan maka dapat membantu usaha kecil dalam pengambilan keputusan yang tepat, mempermudah dalam memperoleh kredit dari kreditur serta dapat menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh pemilik UMKM atau pimpinan perusahaan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan bukan dengan berdasarkan asumsi semata (Maulida, 2020)

Untuk memahami kinerja suatu perusahaan termasuk UMKM perlu dilakukan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Semakin kompleks suatu kegiatan operasional perusahaan maka penyusun laporan keuangan semakin penting untuk diterapkan. Hasil dari penyusun laporan keuangan tersebut adalah berupa informasi yang dapat digunakan untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Pada rapat Ikatan Akuntansi Indonesia yang dilakukan pada tanggal 18 Mei 2016, telah disahkan Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Mikro, Kecil, dan Menengah (ED) yang telah berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018. SAK EMKM yang telah dibuat kini lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP. SAK ETAP diterbitkan sebagai penerapan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sesuai definisi yang ada dalam SAK ETAP, yang memenuhi definisi maupun kriteria sebagai EMKM sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan Septriana & Vitriyani (2016) menunjukkan bahwa UMKM Batik di Kota Semarang masih sangat sederhana dan rata-rata belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik, karena banyak UMKM yang belum sepenuhnya memenuhi tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi. Faktor lainnya yaitu pelaku usaha belum mengetahui pentingnya laporan keuangan dalam menjalankan usaha dan belum memahami tentang SAK EMKM karena sosialisasi mengenai SAK EMKM tersebut belum dilakukan secara menyeluruh. Saputra (2020) menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran akun-akun aset, liabilitas dan ekuitas sudah sesuai dengan SAK EMKM, akan tetapi pada penyajian dan pelaporan atas akun-akun tersebut belum sesuai dengan SAK UMKM, hal ini

dikarenakan UMKM Sukawati belum menyusun laporan posisi keuangan dari catatan atas laporan keuangan.

Masalah terbesar para pelaku UMKM di Dompu adalah pencatatan dan pelaporan keuangan yang belum banyak mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Padahal, hal tersebut sangat penting dan dibutuhkan oleh pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya, pernyataan ini disampaikan oleh salah satu pegawai dari koperasi KPRI Gaya Baru. Berdasarkan peran penting tersebut, maka perlu adanya dukungan dan dorongan yang nyata agar UMKM dapat terus berkembang. Salah satunya yakni melalui optimalisasi sektor pencatatan dan pelaporan keuangan agar lebih maksimal dan modern. Pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel akan membuat para pelaku UMKM lebih terlihat profesional dan terpercaya, sehingga akan mengundang para investor atau kreditur untuk berinvestasi dan membuat bisnis yang dijalankan semakin berkembang. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengimplementasian akuntansi berbasis SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Dompu dan bagaimana persepsi pelaku UMKM di Kabupaten Dompu terhadap SAK EMKM ?

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Entitas. Teori Entitas menyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomi tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Hal ini berarti terdapat pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan. Dengan demikian, transaksi/kejadian yang dicatat dan di pertanggungjawabkan adalah transaksi yang melibatkan perusahaan. Pemilik usaha seringkali bingung menentukan keuntungan yang diraih apabila tidak dilakukan pemisahan keuangan. Lebih parah lagi terjadi apabila tidak terdapat kejelasan uang yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha dengan kegiatan pribadi pemilik usaha. Menurut teori ini, entitas itu dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menanamkan modal ke dalam perusahaan dan unit usaha itulah yang menjadi pusat perhatian yang harus dilayani, bukan pemilik (Lestari, 2022).

SAK EMKM secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasarnya dan oleh karena itu untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan hasil usaha entitas tersebut. Oleh karena itu keterkaitan penelitian ini dengan teori Entitas yaitu dalam menilai pencatatan oleh pelaku UMKM seperti pemisahan antara kepemilikan pribadi dan kepemilikan usaha.

TINJUAN LITERATUR

Teori Entitas (*Entity Theory*)

Teori Entitas yang dikemukakan oleh Paton menyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomi tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Hal ini berarti terdapat pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan. Dengan demikian, transaksi/kejadian yang dicatat dan di pertanggungjawabkan adalah transaksi yang melibatkan perusahaan. Teori Entitas digagas oleh William A Paton yang menurutnya dengan adanya Teori Entitas perusahaan dengan pemiliknya menjadi terpisah. Kepemilikan aset dimiliki oleh perusahaannya, dan antara kewajiban dengan pemegang ekuitas oleh investor dalam aset

tersebut merupakan hak yang berbeda (Lestari, 2022). Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha bukan pemilik.

Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka pengertian UMKM dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi Kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Akuntansi

Definisi akuntansi menurut Financial Accounting Standards Board (FASB) (2017) merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan suatu informasi kuantitatif yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan menurut Paul Akuntansi yaitu sebagai fungsi organisasi secara sistematis, dapat dipercaya dan original dalam mencatat, mengklarifikasi, memproses, membuat ikhtisar, menganalisa, menginterpretasi seluruh transaksi dan kejadian serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasional perusahaan sebagai pertanggungjawaban atas kinerjanya. Akuntansi berasal dari kata asing accounting yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan (Mutiah, 2020).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) menurut SAK EMKM adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut. Berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam terkait implementasi akuntansi pada UMKM berbasis SAK EMKM. Dalam penelitian ini informan yang dipilih yaitu ketua atau pengelola UMKM

yang terdapat di Kabupaten Dompu. Dimana terdapat salah satu koperasi yang memenuhi kriteria untuk diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, analisis data ada beberapa tahapan yang dilakukan, diantaranya yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencatatan

Siklus akuntansi terdiri dari tahap pencatatan dan pengikhtisaran. Tahap pencatatan meliputi: a) Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi b) Pencatatan dalam jurnal c) Pemindahan- bukuan (posting) ke buku besar. Sedangkan pada tahap pengikhtisaran meliputi: a) Pembuatan neraca saldo b) pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian c) Penyusunan laporan keuangan d) Pembuatan jurnal penutup e) Pembuatan neraca saldo penutup f) Pembuatan jurnal balik.

Laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam SAK EMKM, laporan posisi keuangan terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan untuk laporan laba ruginya terdiri dari pendapatan, beban usaha, beban pajak penghasilan, dan laba rugi kotor dan laba rugi bersih setelah pajak.

Drs. H. Juliansyah selaku Bendahara Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Gaya Baru Dinas Koperasi Dan UKM Kab. Dompu menjelaskan bahwa :

“Pencatatan yang dilakukan meliputi pencatatan pengeluaran, pemasukan transaksi dan pencatatan beban-beban seperti beban gaji dan beban pajak dan kami juga mencatat aset lancar, kewajiban jangka panjang dan jangka pendek secara terpisah. Kemudian untuk mengetahui berkembang atau tidak kami menyusun laporan rugi laba”.

Laporan pembukuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Gaya Baru Dinas Koperasi Dan UKM Kab.Dompu telah melakukan pemisahan antara pendapatan dan beban. Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) menjelaskan bahwa ada tiga komponen yaitu, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Namun ada beberapa istilah akun yang digunakan masih belum sesuai dengan SAK EMKM seperti laporan posisi keuangan masih menggunakan neraca, laporan laba rugi masih menggunakan perhitungan sisa hasil usaha (PHU) dan catatan atas laporan keuangan masih menggunakan penjelasan pos-pos neraca.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa pencatatan yang dibuat oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Gaya Baru Dinas Koperasi Dan UKM Kab Dompu sudah sesuai dengan SAK-EMKM karena disusun dengan format yang benar.

Tabel 1. Instrumen Wawancara Pencatatan

Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Pencatatan	Apakah bapak/ibu mencatat setiap adanya transaksi atau setiap bapak/ibu bertransaksi dilakukan pencatatan ?	Ya ! kami mencatatnya
	Bagaimana bapak/ibu mencatat transaksi yang terjadi ?	Mencatat pengeluaran dan pemasukan, mencatat beban-beban seperti beban gaji dan beban lainnya
	Bagaimana bapak/ibu melakukan pencatatan antara aset, keuntungan,	Mencatat aset lancar dan tidak lancar, kewajiban jangka panjang dan jangka

kerugian, beban-beban, dan modal ? Bagaimana bapak/ibu mengetahui bahwa usaha bapak/ibu sudah berkembang atau tidak ? (menghasilkan laba atau rugi)	pendek ke dalam neraca secara terpisah Dengan cara menghitung laporan laba rugi
--	--

Pengakuan Dan Pengukuran

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan posisi keuangan atau laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam SAK EMKM. Kriteria pengakuan mengacu pada saat dapat dipastikan bahwa manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan dan beban di dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran unsur laporan keuangan adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah yang dibayarkan untuk memperoleh aset. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis. Nilai perolehan ini dimaksudkan harga dari pertukaran barang dengan uang yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam transaksi. Pada laporan pembukuan yang dibuat oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Gaya Baru Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompu sudah mencerminkan pengakuan atas pendapatan dan beban yang sesuai SAK EMKM. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban. Pendapatan diakui ketika terdapat hak atas pembayaran yang diterima baik pada masa sekarang atau masa depan. Dalam pengakuan dan pengukuran laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Entitas dapat menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang secara terpisah didalam laporan posisi keuangan dan diukur sebesar biaya perolehan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan tersirat bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Gaya Baru Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompu sudah memiliki pengetahuan dasar akuntansi seperti pemahaman tentang pengakuan penyusutan pada peralatan yang dimiliki. Kemudian pemahaman tersebut sudah sampai pada tahap pengimplementasian dalam hal mengakui dan mengukur nilai yang dimiliki. Drs. H. Juliansyah selaku Kepala Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Gaya Baru Dinas Koperasi Dan UKM Kab. Dompu menjelaskan :

“...beberapa diantara kami sudah memiliki dasar akuntansi seperti pemahaman tentang mengakui beban dan pendapatan kemudian menyajikan aset lancar dan tidak lancar secara terpisah kemudian kami mengimplementasikannya untuk mengukur harga atau nilai yang dimiliki. Terkait pencatatandi lakukan sesuai dengan pembukuan yang ada...”

Biaya penyusutan merupakan unsur yang harus dihitung dalam penentuan nilai aktiva tetap, penghitungan biaya ini berguna untuk memperkirakan apakah sebuah aktiva tetap masih bisa dimanfaatkan atau sudah waktunya diganti. Selain itu, perhitungan biaya penyusutan juga merupakan langkah untuk menjaga kewajaran laporan keuangan. Aset tetap yang dimiliki oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Gaya Baru Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompu telah dicatat dalam pembukuan yang telah dibuat. Nilai aset tetap telah dihitung biaya penyusutan dari masing-masing aset tetap yang dimiliki. Pengukuran untuk akun hutang yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Gaya Baru Dinas Koperasi dan

UKM Kab. Dompu diukur berdasarkan jumlah kewajiban yang meliputi hutang lancar dan hutang jangka panjang. Dalam hal itu, pencatatan yang dilakukn oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Gaya Baru Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompu diukur berdasarkan dalam pembukuan yang ada.

Tabel 2. Instrumen Wawancara Pengakuan Dan Pengukuran

Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Pengakuan dan pengukuran	Bagaimana bapak/ibu mengakui dan mengukur nilai aset, semua jenis hutang dan modal yang masih tersisa ?	Mengakui beban dan pendapatan kemudian menyajikan aset lancar dan tidak lancar secara terpisah kemudia di ukur sebesar harga perolehan
	Bagaimana bapak/ibu mengakui dan mengukur jika ada penyusutan peralatan pada perusahaan?	Mengukur biaya penyusutan dari masing-masing aset tetap yang dimiliki.
	Bagaimana bapak/ibu mengakui dan mengukur nilai-nilai aset bapak/ibu seperti tanah, bangunan atau kendaraan yang dimiliki?	Mengukur berdasarkan jumlah kewajiban seperti hutang lancar dan hutang jangka pendek

Penyajian

Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Pengungkapan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas. Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan:

- Relevan: informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan.
- Representasi tepat: informasi disajikan secara tepat atau secara apa yang seharusnya disajikan dan bebas dari kesalahan material dan bias.
- Keterbandingan: informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan.
- Keterpahaman: informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

Penyajian yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Gaya Baru Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompu sudah sesuai dengan standar SAK EMKM karena disusun dengan format yang benar. Drs. H. Juliansyah selaku Bendahara Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Gaya Baru Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompu menjelaskan :

“...cara kita menyajikan laporan keuangan yaitu dengan mengumpulkan data yg dimiliki dan memasukannya ke dalam neraca kemudian menyusun PHU. Terkait SAK EMKM, ya kami sudah pernah dengar dan yang kita lihat laporan yang kita susun sudah sesuai dengan SAK EMKM, hanya saja akun-akun yang kita pakai masih mengikuti aturan lama...”

Tabel 3 Instrumen Wawancara Penyajian

Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Penyajian	Bagaimana cara bapak/ibu menyajikan laporan keuangan usaha ?	Mengumpulkan data yang diperlukan kemudian menyusun neraca serta menghitung sisa hasil usaha
	Apakah bapak/ibu pernah mendengar SAK EMKM ?	Pernah
	Apa saja kendala bapak/ibu alami saat menyajikan laporan keuangan sesuai SAK EMKM (bagi UMKM yang menerapkan SAK EMKM) ?	Tidak ada kendala hanya saja akun-akun yang dipakai masih mengikuti aturan lama (PSAK No.27)

KESIMPULAN

Usaha mikro kecil menengah membutuhkan strategi pengelolaan keuangan, dimana strategi tersebut dibuat dengan tujuan agar UMKM tersebut dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan produktivitas usahanya. Salah satu upaya pengelolaan keuangan adalah dengan menyusun laporan keuangan tiap periode untuk mengetahui perkembangan usaha dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Gaya Baru Dinas Koperasi Dan UKM Kab. Dompu telah melakukan pencatatan sesuai dengan SAK EMKM. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Gaya Baru Dinas Koperasi Dan UKM Kab. Dompu juga mencatatat beban keuangan dan beban pajak, kemudian mencatat pendapatan dan pengeluaran. Penyusunan keuangan dilakukan secara teratur dimana terdapat aktiva, kewajiban dan modal. Berdasarkan penyajian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, penyajian laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Gaya Baru Dinas Koperasi Dan UKM Kab. Dompu sudah sesuai dengan format SAK EMKM karena laporan keuangan kopersi sudah terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

REFERENSI

- Lestari. (2022). Implementasi Akuntansi Pada Unit Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis Sak Emkm (Studi Pada Umkm Kota Mataram). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 155–165. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.192>
- Maulida, L. F. D. (2020). PENERAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) (Studi Kasus pada CV. 7SEVEN di Pulodarat Pecangaan Jepara). 16, 101–109.
- Mutiah, R. A. (2020). Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Neraca Berbasis SAK-ETAP Pada UMKM. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 194–203. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i2.142>
- Saputra. (2020). Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Jewelry S Celuk Sukawati. *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*, 16(1), 2020. <http://ojs.pnb.ac.id/index.php/JBK58>
- Septriana, I., & Vitriyani, E. (2016). Implementasi Akuntansi Keuangan Berbasis Sak Etap (Studi Kasus Pada Umkm Batik Di Kota Semarang). *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 139–150. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v1i2.2001>
- Sularsih, S. (2019). penerapan akuntansi sak emkm dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM kecamatan lowokwaru. *JAMSWAP*, 4.